PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL UNTUK PENGEMBANGAN USAHA SAPI POTONG

Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Departemen Pertanian
2007

PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL UNTUK PENGEMBANGAN USAHA SAPI POTONG

Penyusun : Ismeth Inounu
Argono R. Setioko
Subandriyo
Budi Haryanto
Kusuma Diwyanto
Lies Parede
Atien Priyanti
Eny Martindah
Imas Sri Nurhayati
Ratna Ayu Saptati

Diterbitkan oleh : Pusat Penelitian dan
Pengembangan Peternakan
Jl. Raya Pajajaran Kav.E-59
Bogor, 16151
Telp. (0251) 322185 ; 322138
Fax (0251) 328382 ; 380588
Email: criansci@indo.net.id

ISBN 978-979-8308-77-2

Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Bogor, 2007

PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL UNTUK PENGEMBANGAN USAHA SAPI POTONG

Hak Cipta @2007. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Jl. Raya Pajajaran Kav.E-59
Bogor, 16151
Telp. : (0251) 322185 ; 322138
Fax : (0251) 328382 ; 380588
Email : criansci@indo.net.id

Isi buku dapat disitasi dengan menyebutkan sumbernya.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil untuk Pengembangan Usaha Sapi Potong / Ismeth Inounu dkk. – Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, 2007: vi + 39 hlm; ilus.; 16 cm.

ISBN 978-979-8308-77-2

1. Sapi Potong 2. Pulau-pulau Kecil
I. Judul; II. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan;
III. Ismeth Inounu 636.22

KATA PENGANTAR

Indonesia yang secara geografis terdiri dari ribuan pulau-pulau memiliki manfaat dan keunggulan komparatif spesifik sebagai perintang alami (*natural barrier*) terhadap peluang penyebaran berbagai macam penyakit hewan menular strategis. Sampai saat ini ribuan pulau-pulau kecil tersebut belum dimanfaatkan dan sangat rawan untuk dikuasai oleh negara lain. Pulau-pulau kecil terluar di wilayah RI terutama yang berbatasan langsung dengan wilayah negara lain mempunyai potensi yang sangat besar ditinjau dari sisi sosial, ekonomi dan budaya serta strategis bagi politik dan pertahanan NKRI.

Di lain pihak, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging sapi yang cenderung terus meningkat, Indonesia telah mengimpor sekitar 400 ribu ekor sapi bakalan dari Australia pada tahun 2006 atau setara dengan Rp. 2.6 Trilyun. Diperkirakan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, pada tahun 2020 konsumsi daging sapi akan melonjak sekitar 2-3 kali lipat. Ketergantungan dari negara pengekspor tunggal dapat mengakibatkan harga mudah terdistorsi dan menjadi rentan karena devaluasi nilai rupiah, sehingga nilai impor cenderung terus meningkat. Upaya untuk mencari negara pengekspor sapi selain Australia dan New Zealand perlu dilakukan dengan memperhatikan status Indonesia yang sampai saat ini masih diakui sebagai negara bebas dari penyakit mulut dan kuku. Upaya ini perlu didukung dengan memanfaatkan iptek kesehatan veteriner yang telah dikuasai dan dengan prosedur tetap yang harus dipatuhi, sehingga pulau-pulau kecil dan terluar dapat dipergunakan sebagai *screening base* dan "kawasan karantina" bagi pengembangan usaha sapi potong.

Berkaitan dengan hal tersebut, Tim Analisis Kebijakan Puslitbang Peternakan telah menyusun konsep awal pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk pengembangan usaha sapi potong di Indonesia. Hal ini dilaksanakan melalui kegiatan workshop bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan

Riau dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis disertai dengan verifikasi hasil di lapang. Berbagai pelaku usaha dan instansi terkait ikut terlibat dalam kegiatan ini seperti pengambil kebijakan, akademisi, asosiasi, organisasi profesi dan praktisi usaha sapi potong. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan usaha sapi potong di Indonesia, utamanya dalam mewujudkan kecukupan daging sapi pada tahun 2010.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya dokumen ini. Buku ini merupakan dokumen dinamis yang dirasakan masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan saran yang bermanfaat guna meningkatkan kualitas sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat berguna bagi para pembaca untuk implementasi program usaha sapi potong lebih lanjut di masa-masa yang akan datang.

Bogor, Nopember 2007
Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Peternakan

Dr. Abdullah Bamualim

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iii

Daftar Isi v

Pendahuluan 1

Tahapan Kegiatan 4

Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil untuk Pengembangan Usaha Sapi Potong 9

- Sasaran 9
- Permasalahan 9
- Program Terpadu 10
- Analisis Resiko 11
- Pola Pengembangan 12
- Dukungan Politis dan Kebijakan 13

Matriks Rencana Tindak Program Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil untuk Pengembangan Usaha Sapi Potong 14

Daftar Bacaan 18

Tim Perumus 21

Lampiran 23

1. Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil untuk Pengembangan Usaha Sapi Potong 24

2. Potensi Sumberdaya Alam dalam Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil untuk Pengembangan Usaha Sapi Potong 26

3. Program Transmigrasi di Pulau-pulau Kecil melalui Pengembangan Usaha Sapi Potong 29

4. Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Pulau-pulau Kecil untuk Pengembangan Ternak Sapi Potong 32

5. Keunggulan Komparatif Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dalam Surveilance dan Monitoring Kesehatan Hewan 34

6. Program Pengembangan Peternakan Sapi di Kabupaten Bengkalis 36

7. Potensi Pulau-pulau Terluar di Provinsi Kepulauan Riau untuk Pengembangan Peternakan Sapi Potong 38

PENDAHULUAN

Indonesia terdiri dari ribuan pulau-pulau dan mempunyai potensi yang sangat besar dari segi sosial, ekonomi dan budaya serta keamanan negara. Pulau-pulau kecil terluar di wilayah RI terutama yang berbatasan langsung dengan wilayah negara lain mempunyai potensi yang sangat strategis dari sisi politik pertahanan dan keamanan bagi Negara Kesatuan RI. Data resmi sampai dengan saat ini menyatakan bahwa jumlah pulau di Indonesia seluruhnya adalah 17.504 pulau, dimana sebanyak 7.870 pulau telah bernama sedangkan lebih dari 9 ribu pulau belum bernama (Departemen Dalam Negeri, 2003).

Kawasan pulau-pulau kecil memiliki potensi pembangunan yang cukup besar dan memiliki arti penting secara ekonomi, sosial, geopolitik dan ekologi. Secara ekonomi potensi sumberdaya hayati dan non hayati di pulau-pulau kecil begitu besar dan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Secara sosial, pengembangan pulau-pulau kecil dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Secara geopolitik hal ini terutama di wilayah perbatasan dapat menjamin keamanan dan ketahanan wilayah NKRI, sedangkan secara ekologis pengembangan pulau-pulau kecil akan semakin meningkatkan pengawasan terhadap ancaman kerusakan ekosistem, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusia (Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 2006). Sehingga, pengelolaan pulau-pulau kecil berguna untuk: (a) menjaga keutuhan wilayah NKRI, (b) memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan, dan (c) memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan, sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 78 Tahun 2005 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.

Secara geografis ribuan pulau-pulau ini memiliki manfaat dan keunggulan komparatif spesifik sebagai perintang alami

(*natural barrier*) terhadap peluang penyebaran berbagai macam penyakit hewan menular strategis. Sampai saat ini ribuan pulau-pulau kecil tersebut belum dimanfaatkan, dan sangat rawan untuk dikuasai oleh negara lain. Pemanfaatan langsung seperti penangkapan ikan, eksploitasi dan konversi ekosistem mangrove, maupun pengambilan karang telah dilakukan oleh masyarakat pulau untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun demikian, penggunaan sumberdaya pulau kecil dengan menerapkan kaidah pemanfaatan secara berkelanjutan dan tidak melampaui daya dukungnya belum banyak dilakukan.

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar sudah mulai dilakukan secara terpadu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta melibatkan instansi terkait dengan memanfaatkan berbagai sumber daya, sumber dana pembangunan, kekuatan ekonomi daerah serta melibatkan peran sektor perbankan (Tabel 1). Disisi lain, pengelolaan pulau-pulau tersebut selama ini belum optimal, karena terkendala oleh (a) ukuran yang relatif kecil dengan lokasi yang terisolir/terpisah dengan pulau induknya (*mainland island)* sehingga penyediaan sarana dan prasarana menjadi mahal, (b) terbatasnya ketersediaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan seperti air tawar, vegetasi, tanah, satwa dan lain sebagainya, (c) kesulitan/ketidakmampuan untuk mencapai skala ekonomi yang menguntungkan, (d) kapasitas kelembagaan pengelola pulau kecil yang rendah, serta (e) regulasi pemanfaatan pulau-pulau yang belum jelas.

Di sisi lain, untuk memenuhi permintaan daging sapi bagi masyarakat Indonesia, pemerintah telah melakukan impor sapi bakalan dari Australia rata-rata sekitar 400 ribu ekor ditambah dengan daging beku dan jerohan. Hal ini diproyeksikan akan terus meningkat sebesar 2-3 kali lipat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik (Kasryno *et al.*, 2004). Quirke *et al.*, (2003) meramalkan bahwa apabila tidak ada upaya trobosan yang signifikan akan menyebabkan ketergantungan

pada daging sapi impor yang sangat tinggi. Salah satu penyebab hal tersebut adalah kecenderungan menurunnya laju pertumbuhan populasi sapi potong di Indonesia dari tahun ke tahun. Ditjennak (2006) menyatakan bahwa pada periode tahun 2001 sampai dengan 2006 pertumbuhan populasi sapi potong menurun sebesar 2.8 persen, dimana penurunan populasi ini lebih merisaukan karena terjadi pada wilayah-wilayah sentra produksi seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Lampung dan Bali. Tantangan ini harus menjadi peluang bagi pengembangan usaha sapi potong di Indonesia.

Tabel 1. Program lintas sektor dalam pengembangan pulau-pulau kecil terluar

No	Program/kegiatan	Departemen/instansi terkait
1	Perhubungan, sarana navigasi dan kepelabuhan	Departemen Perhubungan
2	Sarana infrastruktur	Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah
3	Kelembagaan dan sarana administrasi	Departemen Dalam Negeri
4	Produk/paket wisata	Kementerian Budaya dan Pariwisata
5	Perbatasan antar negara	Departemen Luar Negeri
6	Pemberdayaan pulau-pulau kecil	Departemen Kelautan dan Perikanan
7	Transmigrasi/relokasi nelayan	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8	Pengembangan usaha kecil menengah	Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
9	Pertahanan dan keamanan	Departemen Pertahanan dan Keamanan, TNI AL, Polri

Sumber: Idris, *et al.*, (2007); *inpress.*

Saat ini ketergantungan Indonesia dari negara pengekspor tunggal mengakibatkan harga mudah terdistorsi dan menjadi rentan karena devaluasi rupiah, sehingga nilai impor cenderung semakin meningkat. Upaya untuk mencari negara pengekspor sapi selain dari Australia dan New Zealand perlu

dilakukan dengan memperhatikan status Indonesia yang sampai saat ini masih diakui sebagai negara yang bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK). Upaya ini perlu didukung dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan veteriner yang telah dikuasai dan dengan prosedur tetap yang harus dipatuhi (*law enforcement*), sehingga pulau-pulau kecil dan terluar dapat dipergunakan sebagai *screening base* dan "kawasan karantina" usaha sapi potong. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki keunggulan komparatif untuk membangun industri pembibitan sapi potong di suatu pulau yang terisolir agar ancaman penyakit dapat diminimalkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan sinergisme dan integrasi program pemerintah dengan sub sektor lain yang sama-sama turut membangun di kawasan pulau-pulau kecil, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan melalui tim Analisis Kebijakan telah berupaya untuk memberikan masukan/saran rekomendasi kepada pemerintah tentang pentingnya pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk pengembangan usaha sapi potong. Penyusunan konsep ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti workshop/lokakarya, diskusi internal lintas sektoral dan verifikasi di lapang dengan berbagai pelaku usaha dan instansi terkait.

TAHAPAN KEGIATAN

Sebagai langkah awal dilakukan *desk study* berdasarkan beberapa informasi yang telah diperoleh dari berbagai instansi seperti: Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertanian (cq. Ditjennak dan Badan Karantina), Bappenas, serta Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Informasi dari Badan Karantina Pertanian menyatakan bahwa pemanfaatan pulau kecil sebagai karantina

pulau pernah direncanakan di Kepulauan Riau (pulau Kelapa Jeri), tetapi terkendala oleh ketersediaan anggaran. Peluang impor ternak sapi dari negara lain di bagian Barat Indonesia seperti Argentina dan India dengan tetap mempertimbangkan resiko masuknya penyakit, sangat memerlukan "Karantina Pulau" yang banyak diperankan oleh pulau-pulau kecil dengan lokasi yang strategis dan infrastruktur yang memadai.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melalui Ditjen Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (Ditjen P4T), memiliki program 'Pembukaan Pulau-pulau Kecil dan Terluar' yang merupakan kerjasama dengan berbagai instansi terkait seperti Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen dalam Negeri dan Pemda setempat. Prioritas pemanfaatan pulau-pulau tersebut akan dilakukan di 3 (tiga) pulau kecil, yakni (a) P. Rupat di Bengkalis-Riau, (b) P. Morotai di Kabupaten Halmahera-Maluku Utara, dan (c) P. Wetar di Maluku Tenggara.

Pada tanggal 6-10 Juni 2007, tim Analisis Kebijakan Puslitbang Peternakan melakukan kunjungan lapang ke Riau dalam rangka mengeksplorasi informasi tentang kebijakan pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk pengembangan usaha sapi potong di Propinsi Riau. Tim diketuai oleh Dr. Ismeth Inounu dengan anggota Dr. Argono R. Setioko, Dr. Enny Martindah, Ratna A. Saptati, MSi dan Yusuf Halim, SH. Tim ini didampingi oleh peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Propinsi Riau, Dwi Sisriyenni, MSi. Guna memperoleh informasi awal, Tim Anjak melakukan: (1) kunjungan ke Dinas Peternakan Propinsi Riau, (2) pertemuan dengan staf Bappeda dan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkalis, serta (3) kunjungan ke Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis. Hasil kunjungan dan koordinasi dengan instansi terkait direkomendasikan untuk melaksanakan kegiatan workshop di Kabupaten Bengkalis. Di wilayah Propinsi Riau dan Kepulauan Riau terdapat 1300 pulau,

dan di antara pulau-pulau tersebut sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai karantina pulau atau pengembangan usaha sapi potong mengingat akses transportasi yang relatif mudah serta lokasi yang strategis karena dekat dengan pasar lokal maupun ekspor seperti Malaysia dan Singapura.

Pelaksanaan workshop 'Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil untuk Pengembangan Usaha Sapi Potong' telah dilaksanakan di Bogor pada tanggal 11 September 2007. Workshop ini bertujuan untuk (a) mengidentifikasi potensi pulau-pulau kecil yang dapat dikelola untuk pengembangan usaha sapi potong dan "karantina pulau", serta (b) menghimpun masukan dari berbagai pihak yang kompeten dalam perencanaan program pengembangan peternakan maupun karantina pulau dengan memanfaatkan pulau-pulau kecil potensial. Keluaran dari workshop tersebut adalah (a) teridentifikasinya pulau-pulau kecil potensial untuk pengembangan usaha sapi potong dan karantina pulau, (b) konsep rencana tindak maupun program aksi yang dapat diimplementasikan dalam rangka memanfaatkan pulau-pulau kecil untuk pengembangan usaha sapi potong, dan (c) membangun jejaring kelembagaan antar instansi terkait yang telah memiliki program pemanfaatan pulau-pulau kecil.

Workshop ini dihadiri oleh sekitar 70 orang dari berbagai instansi terkait seperti dari Perguruan Tinggi (IPB; UGM dan UNIBRAW); DEPTAN: Staf Khusus Mentan Bidang Ekonomi Pertanian; Kepala Pusat Karantina Hewan; Direktur Perbibitan; Ka BBVet Wates; Kepala Puslitbang Peternakan; Peneliti lingkup Puslitbangnak; Balitnak; BBalitvet; BBP2TP; Ka BPTP Riau; Departemen Kelautan dan Perikanan (Direktorat Pemberdayaan Pulau-pulau Kecil); Depnakertrans (Dir. Promosi, Investasi dan Kemitraan); Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; PEMDA: Bappeda Kab. Bengkalis; Bappeda NTB; Dinas Peternakan Kab. Sumbawa; Bappeda Bangka Belitung; BAPPENAS; Centras LPPM IPB; dan Swasta/praktisi dari PT

Lembu Jantan Perkasa. Narasumber yang dihadirkan beserta topik bahasan adalah sebagai berikut:

1. **Dr. Ismeth Inounu (Penanggung Jawab Tim Anjak Puslitbang Peternakan)**: "Pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk pengembangan usaha sapi potong".
2. **Direktur Pemberdayaan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan**: "Potensi sumberdaya alam dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk pengembangan usaha sapi potong"; dengan butir-butir bahasan:
    a. Profil pulau-pulau kecil berdasarkan potensi sumberdaya alam
    b. Peluang pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk pengembangan usaha sapi potong
3. **Sekretaris Ditjen P4T, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi**: "Program transmigrasi di pulau-pulau kecil melalui pengembangan usaha sapi potong"; dengan butir-butir bahasan:
    a. Peluang penempatan transmigran di pulau-pulau kecil: Pendekatan sosio-kultural
    b. Peluang pengembangan usaha sapi potong pada program Kota Terpadu Mandiri (KTM)
4. **Sekretaris Ditjen Peternakan**: "Pemanfaatan potensi sumberdaya pulau-pulau kecil untuk pengembangan ternak sapi potong"; dengan butir-butir bahasan:
    a. Kondisi saat ini dan perkembangan impor bakalan sapi potong
    b. Dukungan kebijakan importasi bakalan sapi potong
    c. Peluang rencana tindak pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagai wilayah perbibitan sapi potong

5. **Prof. Dr. Drh. Setyawan Budiarta, Fakultas Kedokteran Hewan, UGM**: "Keunggulan komparatif pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam surveilans dan monitoring kesehatan hewan"; dengan butir-butir bahasan:
    a. Potensi kepulauan Indonesia sebagai barier pencegahan penyakit
    b. Strategi pengamanan sapi impor dari negara lain
    c. Dukungan kebijakan yang diharapkan
6. **Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkalis:** "Pengembangan peternakan sapi di Kabupaten Bengkalis"
7. **Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Propinsi Kepulauan Riau:** "Potensi pulau-pulau terluar di Provinsi Kepulauan Riau untuk pengembangan peternakan sapi potong"

PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL UNTUK PENGEMBANGAN USAHA SAPI POTONG

SASARAN

1. Mengupayakan peningkatan populasi dan pengembangan sapi potong di Indonesia dengan memanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar yang sejalan dengan Peraturan Presiden RI No. 78 Tahun 2005 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dengan tujuan (a) menjaga keutuhan wilayah NKRI, (b) memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan, dan (c) memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

2. Mencari kemungkinan impor sapi bakalan dari negara lain dengan memanfaatkan IPTEK veteriner yang telah dikuasai dan prosedur tetap yang harus dipatuhi (*law enforcement*), sehingga pulau-pulau kecil dan terluar dapat dipergunakan sebagai *screening base* dan "kawasan karantina" usaha sapi potong.

PERMASALAHAN

Dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk pengembangan sapi potong ditemui permasalahan-permasalah sebagai berikut:

a. Keterbatasan sumberdaya manusia, perlu dilakukan *up-scaling* ketrampilan peternak.

b. Sumberdaya alam: keterbatasan penyediaan air bersih dan sumber pakan.

c. Keterbatasan sarana dan prasarana yang berkualitas.

d. Keterbatasan infrastruktur dan alat transportasi: jalan, kapal, pelabuhan, pos keswan, alat telekomunikasi dan pasar.

e. Keterbatasan dukungan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, pembuatan pelabuhan, jalan dan listrik (oleh pemerintah), untuk pengembangan usaha peternakan secara intensif maupun semi intensif (oleh swasta) serta untuk usaha peternakan ekstensif (oleh masyarakat).

f. Problem lingkungan, bencana serta pertahanan dan keamanan (penyakit).

g. Masih lemahnya koordinasi lintas sektoral yang terintegrasi.

PROGRAM TERPADU

Program terpadu dari berbagai sektor yang turut membangun di kawasan pulau pulau kecil sangat diperlukan, sehingga dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya. Saat ini pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau terluar dikoordinasikan oleh tim Koordinasi, sebagai ketua: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; wakil Ketua: Menteri Kelautan dan Perikanan. Kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing Departemen dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

a. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah membuat konsep pengembangan wilayah dan lokasi pemukiman transmigrasi mendukung pengembangan gugus pulau dan kawasan laut pulau.

b. Departemen Kelautan dan Perikanan telah melakukan Profil/identifikasi pulau-pulau kecil dan terluar, di semua propinsi kecuali DKI Jaya dan Irian Jaya Barat.

c. Departemen Dalam Negeri telah melakukan penentuan wilayah administrasi.

d. Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal telah membuat Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) dan Program Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Daerah Teringgal (P4DT).

e. Pemerintah Daerah telah mempersiapkan penyediaan lahan dan program pengembangan kawasan mandiri.

ANALISIS RESIKO

1. Berkaitan dengan ancaman penyakit, maka perlu sistem surveilans penyakit dan kesehatan kawasan sapi yang mencakup komitmen melaksanakan metodologi baku, adanya personil yang berkualifikasi baik, infrastruktur yang memadai serta didukung oleh dana yang mencukupi. Untuk itu diperlukan pula tatakelola yang komprehensif dengan kaidah satu kawasan kepulauan *"one isle one management plan"*

2. Pengamanan pulau sangat diperlukan dalam artian bila terjadi *outbreak* penyakit yang tidak diinginkan maka penyakit tidak menyebar ke pulau terdekat dan terus ke pulau besar (P. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian) baik melalui transportasi maupun oleh hembusan angin.

3. Diperlukan sistem kesehatan hewan dimana bila terjadi *outbreak* penyakit dapat segera diberantas.
4. Diperlukan pengamanan keluar dan masuknya ternak dari dan ke pulau-pulau kecil.

POLA PENGEMBANGAN

1. Pola pengembangan peternakan sapi potong dapat dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan transmigrasi melalui pendekatan penempatan transmigrasi yang sudah ada (PTA) maupun penempatan transmigrasi yang baru (PTB). Dengan demikian pengembangan usaha ternak sapi potong pada pulau-pulau kecil akan sekaligus memberikan kesempatan kerja baik bagi para transmigran maupun masyarakat setempat. Namun demikian masih diperlukan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia agar usaha pengembangan sapi potong dapat berjalan pada tahap yang lebih maju dan profesional. Kegiatan ini juga dapat membuka kemungkinan akses ke luar daerah sebagai konsekuensi aktivitas pemasaran hasil usaha.
2. Pola pengembangan usaha ternak sapi yang dilakukan dapat mencakup aspek pembibitan, pembesaran dan penggemukan dengan memperhatikan potensi pengembangan kawasan pulau-pulau kecil yang didasarkan pada kondisi wilayah yang ada, kelemahan-kelemahan yang dimiliki, ancaman potensial yang mungkin terjadi dan peluang-peluang yang mungkin dikembangkan. Akan sangat baik apabila usaha sapi potong ini juga diikuti dengan usaha pascapanen untuk menghasilkan produk akhir siap saji atau siap jual (dalam bentuk karkas).

DUKUNGAN POLITIS DAN KEBIJAKAN

1. Dukungan politis dari pemerintah pusat, daerah dan legislatif sangat diperlukan dalam pembangunan infrastruktur di lokasi-lokasi prioritas untuk kawasan pengembangan usaha ternak sapi potong. Hal ini meliputi pengembangan jalur transportasi laut, darat dan udara antar pulau agar dapat menjangkau pulau-pulau kecil tersebut sebagai pusat-pusat pengembangan usaha ternak sapi potong.
2. Perlu dukungan kepastian hukum dan kemudahan regulasi dalam penataan ruang, kemudahan mendapatkan lahan dan perijinan usaha serta kebijakan dalam pengendalian impor daging. Kebijakan dalam impor sapi dari negara-negara penghasil sapi (selain Australia dan New Zealand) dengan kawalan IPTEK veteriner sejak dari negara asal sampai ke penempatannya di pulau-pulau kecil.
3. Dalam upaya meningkatkan investasi dalam usaha sapi potong di pulau-pulau kecil, diperlukan instrumen kebijakan berupa penyediaan dan aksesibilitas perbankan dan subsidi bunga kredit komersial yang terjangkau (sekitar 6%).

MATRIKS RENCANA TINDAK PROGRAM PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL UNTUK PENGEMBANGAN USAHA SAPI POTONG

Rencana Tindak	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggung Jawab
I. PENINGKATAN POPULASI			
1. Upaya peningkatan populasi dan pengembangan sapi potong di Indonesia dengan memanfaatkan pulau-pulau kecil dan terluar	Peningkatan populasi ternak sapi potong dan usaha sapi potong	2008-2010	Pemprov, Pemkab, DitjenNak
2. Upaya mencari alternatif negara penghasil sapi potong dengan tetap memperhatikan standar yang ditetapkan OIE	Tersedianya bibit sapi potong di daerah dan terciptanya kantong-kantong bibit ternak sapi di pulau-pulau kecil	2008-2010	Pemprov, DitjenNak, Bbalitvet; Puslitbangnak
3. Upaya pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagai *screening base* dan kawasan karantina bagi usaha sapi potong	Terindentifikasinya pulau-pulau kecil yang dapat dimanfaatkan untuk *screening base* dan kawasan karantina usaha pengembangan sapi potong	2008-2009	Pemprov, Dinas terkait, DitjenNak, Badan Karatina, Ditjen Pengelolaan Pulau-pulau Pesisir, DKP

II. SARANA DAN PRASARANA			
1. Penyediaan infrastruktur sebagai katalisator pembangunan wilayah pulau-pulau kecil	Tersedianya sarana transportasi (darat, laut dan udara), kapal, listrik, telekomunikasi, pengairan	2008-2010	Pemerintah Pusat (PU), DEPHUB; Pemprov, Pemkab, BUMN/swasta
2. Pembangunan pos kesehatan hewan untuk memantau penyakit hewan menular strategis	Tertanganinya kasus penyakit hewan menular strategis dan berbahaya dengan cepat dan tepat	2008-2010	Ditjennak, Pemprov, Pemkab
II. POLA PENGEMBANGAN USAHA SAPI POTONG			
1. Penempatan transmigrasi yang sudah ada (PTA) dan transmigrasi baru (PTB)	Terbukanya peluang kerja dan pengembangan usaha sapi potong bagi para transmigran dan masyarakat setempat	2008-2010	Pemprov, Pemkab, Dit P4T Depnaker-trans
2. Pengembangan pola pembibitan, pembesaran dan penggemukan usaha sapi potong	Terbentuknya kawasan pengembangan pembibitan, pembesaran dan penggemukan sapi potong dalam pulau-pulau kecil	2009-2015	Pemkab, DitjenNak, Swasta/ BUMN

3. Penyediaan kawasan tanaman pangan dan pakan ternak	Terbentuknya kawasan untuk penyediaan pangan dan pakan ternak	2008-2009	Pemprov dan Pemkab, Swasta / BUMN
III. DUKUNGAN POLITIS DAN KEBIJAKAN			
1. Optimalisasi *political will* pemerintah pusat dan daerah terhadap pembangunan pulau-pulau kecil	Terbangunnya pusat-pusat pengembangan usaha sapi potong di pulau-pulau kecil	2008-2015	DPR/D, Pemerintah Pusat Pemprov, Pemkab, dan Dinas terkait
2. Penegakan aturan dan kepastian hukum dalam penataan ruang, kemudahan mendapatkan lahan dan perijinan usaha pengembangan sapi potong	Terbentuknya kawasan pengembangan usaha sapi potong di pulau-pulau kecil yang berkelanjutan Terjaminnya kemananan berusaha	2008-2010	Pemprop, Pemkab, DepHankam
3. Penegakan aturan dalam pengendalian impor daging sapi	Berkurangnya jumlah impor daging sapi secara ilegal dari wilayah lain	2008-2010	Pemprov, Pemkab dan Dinas terkait Deptan
4. Peningkatan wawasan dan kemampuan sumberdaya manusia	Meningkatnya ketrampilan para transmigran dan masyarakat setempat sehingga usaha sapi	2008-2010	Pemprov, Pemkab dan Dinas terkait Deptan

	potong dapat berjalan pada tahap yang lebih maju dan profesional		
5. Percepatan pembangunan pulau-pulau kecil berbasis usaha sapi potong	Masyarakat yang memiliki usaha sapi potong secara berkelanjutan	2008-2015	Kementerian PDT, Pemprov, Pemkab
6. Dukungan kebijakan investasi melalui subsidi bunga kredit komersial (6%)	Swasta/BUMN yang tertarik untuk mengembang-kan usaha sapi potong sebagai penghasil bakalan	2008-2010	Swasta/BUMN Perbankan, Pemprov, Pemkab
7. Kemudahan akses petani pada lembaga keuangan mikro (LKM) sebagai sumber pembiayaan usaha sapi potong	Terakselerasi-nya perkembangan pulau-pulau kecil dan menjadi wilayah kegiatan wirausaha mandiri	2008-2010	Deptan, Pemprov, Pemkab

DAFTAR BACAAN

Budiharta, S. Dan Purnomo, P.D. 2007 Keunggulan komparatif pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam surveillance dan monitoring kesehatan hewan. Makalah dipresentasikan pada acara Workshop Pemanfaatan Pulau-pulau kecil untuk pengembangan usaha ternak sapi potong. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor, 11 September 2007.

Departemen Kelautan dan Perikanan, 2004. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Pulau-pulau Kecil. Editor: Mawardi, I dan Retraubun, A.S.W. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Departemen Kelautan dan Perikanan. 2004. Profil Pulau-Pulau Kecil Terluar di Indonesia. Penyusun: Retraubun, A.S.W. dan Atmini, S. Edisi I. Departemen Kelautan dan Perikanan. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Direktorat Pemberdayaan Pulau-pulau Kecil. Jakarta.

Departemen Kelautan dan Perikanan. 2007. Potensi sumberdaya alam dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk pengembangan sapi potong. Makalah dipresentasikan pada acara Workshop Pemanfaatan Pulau-pulau kecil untuk pengembangan usaha ternak sapi potong. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor, 11 September 2007.

Departemen Dalam Negeri. 2006. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum. Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan. Subdit Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbatasan. Jakarta.

Direktorat Jenderal Peternakan. 2006. Buku Statistik Peternakan. Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian, Jakarta.

Direktorat Jenderal Peternakan. 2007. Program Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi Tahun 2010 (P2SDS). Jakarta.

Idris, Irwandi. 2007. Membangunkan Raksasa Ekonomi. Sebuah Kajian Terhadap Perundangang-undangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. (*InPress*).

Inounu, I. 2007. Pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk pengembangan usaha ternak sapi potong. Makalah dipresentasikan pada acara Workshop Pemanfaatan Pulau-pulau kecil untuk pengembangan usaha ternak sapi potong. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor, 11 Septernber 2007.

Jaafar, S. Potensi pulau-pulau terluar di Propinsi Kepulauan Riau untuk pengembangan peternakan sapi potong. Makalah dipresentasikan pada acara Workshop Pemanfaatan Pulau-pulau kecil untuk pengembangan usaha ternak sapi potong. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor, 11 September 2007.

Madyo, L. 2007. Program Transmigrasi di pulau-pulau kecil melalui pengembangan usaha sapi potong. Makalah dipresentasikan pada acara Workshop Pemanfaatan Pulau-pulau kecil untuk pengembangan usaha ternak sapi potong. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor, 11 September 2007.

Pemda Kabupaten Bengkalis, 2007. Program Pengembangan Peternakan Sapi di Kabupaten Bengkalis. Makalah dipresentasikan pada acara Workshop Pemanfaatan Pulau-pulau kecil untuk pengembangan usaha ternak sapi potong. Pusat Penelitian dan Pengembangan

Peternakan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor, 11 September 2007.

Quirke, D., M. Harding, D. Vincent and D. Garrett. 2003. Effects of Globalisation and Economic Development on the Asian Livestock Sector. ACIAR Monograph Series 97 e.

TIM PERUMUS

1. Prof. Dr. Drh. Setyawan Budiharta – Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
2. Prof. Dr. Sjamsul Bahri – Direktorat Perbibitan, Ditjen Peternakan
3. Prof. Dr. Subandriyo – Balai Penelitian Ternak, Ciawi - Bogor
4. Dr. Ismeth Inounu – Puslitbang Peternakan, Bogor
5. Dr. Lies Parede – Balai Besar Penelitian Veteriner, Bogor
6. Dr. Argono R. Setioko – Balai Penelitian Ternak, Ciawi – Bogor
7. Dr. Atien Priyanti – Puslitbang Peternakan, Bogor
8. Dr. Eny Martindah – Puslitbang Peternakan, Bogor
9. Drh. Honismandri – Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau
10. Drs. L. Madyo – Direktorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi
11. Drh. Kisman A. Rasyid – Pusat Karantina Hewan, Departemen Pertanian
12. Ir. Muhammad Ismail, MP – Direktorat Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan
13. Ir. Ahmad Ramli, MS – Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkalis
14. Ir. Andjar Koentjoro, MS – Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
15. Tarmizi – Bappeda Kabupaten Bengkalis

LAMPIRAN

PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL UNTUK PENGEMBANGAN SAPI POTONG

Ismeth Inounu

Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor

RINGKASAN

Pemerintah telah menetapkan program menuju kecukupan daging sapi tahun 2010. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau-pulau kecil (PPK) yang sangat bermanfaat sebagai perintang alami (*natural barrier*) terhadap peluang penyebaran berbagai macam penyakit hewan menular strategis. Keunggulan ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sapi potong. Keterbatasan yang ditemui dalam pengelolaan PPK adalah: sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sarana dan prasarana, infrastruktur dan alat transportasi, serta masih lemahnya koordinasi lintas sektoral yang terintegrasi. Dukungan IPTEK peternakan dan veteriner sangat diperlukan dalam pemanfaatan PPK sebagai *screening base* dan "kawasan karantina" usaha sapi potong. Pola pengembangan peternakan sapi potong dapat dilakukan secara terintegrasi dengan program pembangunan transmigrasi melalui pendekatan penempatan transmigrasi yang sudah ada (PTA) dan penempatan transmigrasi yang baru (PTB). Dengan demikian pengembangan usaha sapi potong pada PPK dapat menciptakan kesempatan kerja baik bagi para transmigran maupun masyarakat setempat. Pola pengembangan usaha sapi yang dilakukan mencakup aspek pembibitan, pembesaran dan penggemukan dengan tetap memperhatikan potensi pengembangan kawasan PPK yang didasarkan pada kondisi wilayah yang ada, kelemahan-kelemahan yang dimiliki, ancaman potensial yang mungkin

terjadi serta peluang yang mungkin dikembangkan. Dukungan politis dari pemerintah pusat, daerah dan legislatif sangat diperlukan dalam pembangunan infrastruktur di lokasi-lokasi prioritas untuk kawasan pengembangan usaha sapi potong. Disamping itu diperlukan pula dukungan kepastian hukum dan kemudahan regulasi dalam penataan ruang, kemudahan mendapatkan lahan dan perijinan usaha, kebijakan dalam pengendalian impor daging serta kebijakan penyediaan dan aksesibilitas perbankan dan subsidi bunga kredit yang terjangkau.

POTENSI SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL UNTUK PENGEMBANGAN SAPI POTONG

M. Ismail, MP.

Direktorat Pemberdayaan Pulau-pulau Kecil
Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta

RINGKASAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau 17.504, dimana sebagian besar merupakan pulau-pulau kecil (luas kurang atau sama dengan 10.000 km^2, dengan jumlah penduduk kurang atau sama dengan 200 ribu), yang mempunyai peran strategis baik secara politis, ekonomi, pertahanan keamanan, ekologis maupun sosial budaya. Posisi pulau-pulau kecil tersebut berbatasan di laut dengan sepuluh negara dan di daratan dengan tiga negara. Pulau-pulau kecil tersebut memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat produktif. Semakin menurunnya sumberdaya daratan akibat pemanfaatan untuk berbagai kepentingan, telah mendorong adanya pengalihan pemanfaatan ke arah sumberdaya kelautan. Salah satu sumberdaya kelautan tersebut adalah pulau-pulau kecil.

Pembangunan kepulauan kecil diarahkan pada pembangunan berkelanjutan baik secara ekologis maupun ekonomis, dengan penekanan pada pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia bagi pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dan generasi mendatang. Sumberdaya alam yang terdapat di kepulauan kecil dibedakan menjadi sumberdaya yang dapat pulih

(renewable resources), tidak dapat pulih *(unrenewable resources)* dan jasa-jasa lingkungan *(environmental services)*. Pengembangan sumberdaya kepulauan kecil harus didasarkan pada kelestarian sumberdaya pulau-pulau kecil yang dapat pulih. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa sumberdaya kepulauan kecil yang dapat pulih memerlukan persyaratan kualitas lingkungan yang baik; memiliki nilai ekonomi jangka panjang dengan tingkat diskonto rendah; memiliki kontribusi nilai ekonomi yang tidak dapat diukur dan tidak langsung yang tinggi dan kontinyu serta relatif tidak menimbulkan dampak negatif.

Beberapa isu utama dan permasalahan pengembangan kawasan pulau-pulau kecil antara lain adanya kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan dan berpotensi menjadi kekecewaan publik; keberadaan sarana dan prasarana yang sangat terbatas; tempat berlangsungnya kegiatan illegal, konflik pemanfaatan ruang dan lemahnya koordinasi antara unsur terkait. Sehingga pendekatan arah kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat harus mengkombinasikan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan ekosistem, ruang, hak atas tanah dan perairan serta kearifan lokal. Untuk mengurangi terjadinya dampak negatif, pemerintah melakukan pembatasan kegiatan dimana pemanfaatan pulau-pulau kecil hanya diijinkan dengan luas kurang atau sama dengan 2000 km^2. Pemanfaatan pulau-pulau kecil tersebut hanya diperbolehkan untuk kegiatan konservasi, budidaya laut, pariwisata, usaha penangkapan dan industri perikanan secara lestari, pertanian organik dan peternakan, pendidikan dan penelitian serta industri manufaktur dan pengolahan ramah lingkungan.

Pengembangan pulau-pulau kecil untuk kegiatan usaha peternakan terutama adalah untuk pulau tidak berpenghuni dan memiliki potensi pakan alami (rumput dan daun-daunan. Kegiatan peternakan yang dilakukan meliputi sarana produksi

(bibit, pakan, ternak), budidaya, dan pasca panen (pemotongan, pengolahan) yang dilaksanakan dalam skala rumah tangga. Salah satu pulau-pulau kecil yang mampu mengembangkan bibit sapi potong unggulan seperti sapi Madura adalah Pulau Sapudi Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Integrasi pembangunan pulau kecil memerlukan penanganan dalam bentuk kemitraan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, perguruan tinggi dan institusi TNI. Dalam pelaksanaannya harus melibatkan seluruh instansi sektoral terkait dengan berbagai sumber dana pembangunan (lokal, nasional dan internasional), kekuatan ekonomi daerah serta melibatkan peran sektor perbankan pemerintah dan swasta serta lembaga keuangan non bank. Untuk mengetahui perkembangan dini tentang kondisi sumberdaya alam harus dilakukan monitoring dan kajian ulang terhadap sistem pemanfaatannya yang dapat digunakan sebagai umpan balik (*feedback control*) untuk melakukan evaluasi terhadap status sumberdaya alam dan sistem pengelolaan yang diterapkan selama ini. Sehingga pemanfaatan terhadap sumberdaya alam dapat dilakukan dengan cara yang lebih bijaksana dan terus menerus.

PROGRAM TRANSMIGRASI DI PULAU PULAU KECIL MELALUI PENGEMBANGAN USAHA SAPI POTONG

L. MADYO

Ditjen Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta

RINGKASAN

Pembangunan transmigrasi diarahkan pada wilayah strategis, tertinggal yang dapat cepat tumbuh, serta pada daerah perbatasan. Termasuk di antaranya yang teletak di beberapa wilayah kepulauan. Saat ini terdapat tujuh provinsi kepulauan di Indonesia yaitu : Kepri, Kep. Babel, NTB, NTT, Sulut, Maluku dan Malut. Untuk mendorong pembangunan wilayah pada propinsi kepulauan tersebut pemerintah pusat telah melibatkan program transmigrasi.

Masalah mendasar dalam pembangunan wilayah kepulauan adalah (a) adanya rentang kendali yang terlalu luas dan sulit terjangkau dalam melaksanakan tugas pemerintahan; (b) lambannya perputaran roda pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi; (c) dinamika ekonomi terbatas dan berskala kecil; (d) ketersediaan SDA beragam dan jumlahnya terbatas; (e) terbatasnya sumber pembiayaan (APBD dan APBN), serta kecilnya perolehan DAU dan DAK; (f) lokasinya berada pada wilayah perbatasan, rentan terhadap infiltrasi dan intervensi dari negara tetangga (IPOLEKSOSBUD). Untuk itu diperlukan model pembangunan provinsi kepulauan melalui pendekatran Gugus pulau dan kawasan laut pulau yang mengintegrasikan SDA daratan dan Lautan. Disamping itu permasalahan yang dihadapi dalam ketransmigrasian adalah: (a)

kurangnya SDM, baik kuantitas maupun kualitas; (b) daya tarik investasi rendah menyebabkan kurang berkembangnya kesempatan kerja dan peluang berusaha; (c) terbatasnya akses masyarakat terhadap modal dan pasar; (d) kemitraan usaha belum berjalan dengan baik; (e) program transmigrasi di wilayah kepulauan belum berhasil dengan baik. Dengan demikian diperlukan kebijakan dan strategi penyelenggaraan transmigrasi mendukung pembangunan wilayah kepulauan.

Dalam pembangunan dan pengembangan gugus pulau dan kawasan laut pulau untuk transmigrasi perlu dibangun suatu komitmen yang kuat dengan stakeholders (pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, dunia usaha serta masyarakat) serta dilakukan dengan pendekatan konsep pengembangan wilayah transmigrasi (WPT) dan lokasi permukiman transmigrasi (LPT) yang mendukung pengembangan gugus pulau dan kawasan laut pulau; disamping harus mengutamakan kemudahan dalam regulasi penataan ruang, kemudahan dalam mendapatkan lahan dan perijinan usaha. Disamping itu perlu dilakukan revitalisasi permukiman transmigrasi yang sudah ada dan yang sudah diserahkan agar dapat berkembang sesuai dengan karakteristik gugus pulau terutama dari aspek sistem transportasi laut sebagai pemersatu. Selain itu perlu mengikut-sertakan anggota dan purnawirawan TNI POLRI sebagai transmigran, khususnya untuk mengisi wilayah-wilayah perbatasan; mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam berupa daratan, pesisir dan lautan dalam rangka mendukung kemandirian pangan dan perluasan kesempatan kerja; meningkatkan kualitas SDM transmigran dan penduduk sekitar melalui BLK yang disesuaikan dengan karakteristik keunggulan gugus pulau; mengikut-sertakan para mahasiswa program KKN dalam pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi, serta meningkatkan jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang mampu mengelola sumberdaya di wilayahnya untuk usaha produktif seperti ternak potong.

Untuk tahun 2008 depnakertrans merencanakan untuk mengirimkan transmigran sebanyak 1920 KK ke propinsi Sulawesi Utara; Maluku; Maluku Utara; dan Nusa Tenggara Timur. Pada lokasi-lokasi transmigrasi, termasuk yang berada di pulau pulau kecil sangat memungkinkan untuk pembangunan usaha sapi potong. Kegiatan ini akan semakin lancar manakala hambatan-hambatan yang ada dapat dikurangi dan koordinasi lintas sektor dapat terus ditingkatkan.

PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA PULAU-PULAU KECIL UNTUK PENGEMBANGAN TERNAK SAPI POTONG

Tjeppy D. Soedjana

Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan
Departemen Pertanian, Jakarta

RINGKASAN

Kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia telah menyebabkan sebahagian penduduk meningkatkan permintaannya terhadap produk-produk hasil ternak seperti daging, telur dan susu. Pada saat ini produksi domestik daging sapi baru mencapai sekitar 72% dari kebutuhan konsumsi, selebihnya masih harus diimpor dalam bentuk ternak bakalan yang diperkirakan mencapai 350.000 ekor/tahun maupun daging sekitar 50.000 ton/tahun. Kondisi usahaternak sapi potong domestik diperkirakan hanya mampu menyediakan sebesar 259.200 ton daging sapi pada 2010, berarti masih harus diimpor sebanyak 37,4% agar kebutuhan konsumsi nasional 414.300 ton terpenuhi.

Program percepatan swasembada daging sapi melalui 7 langkah di 18 propinsi utama untuk intensifikasi IB, kawin alam, maupun kombinasinya, diperkirakan akan mampu memberikan tambahan sebanyak 114.500 ton daging pada 2010, sehingga masih harus diimpor sebanyak 9,8%. Walaupun menurut Bappenas angka impor (9,8%) ini sudah dapat dikategorikan swasembada (produksi domestik minimal 90%), tetapi masih ada potensi sumberdaya lain yang ditawarkan oleh pulau pulau kecil yang tersebar di Nusantara ini untuk dimanfaatkan sebagai

sumber produksi ternak sapi potong. Namun demikian, kriteria pengambilan keputusan tentang komponen usahatani apa saja yang berpotensi memberikan penghasilan kepada penduduknya, dan pulau pulau mana saja yang bisa menawarkan *cost effectiveness* dalam transportasi hasil hasilnya ke berbagai simpul pemasaran yang sudah tersedia di pulau pulau utama, maka pendekatan analisis Titik Impas dan kombinasinya dengan solusi optimum melalui Linear programming model transportasi disarankan untuk digunakan sebagai langkah awal.

KEUNGGULAN KOMPARATIF PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DALAM SURVEILANCE DAN MONITORING KESEHATAN HEWAN

Setyawan Budiharta[1)] dan Putut D. Purnomo[2)]

[1)] *Fakultas Kedokteran Hewan*
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
[2)] *Balai Besar Veteriner, Wates, Yogyakarta*

RINGKASAN

Indonesia terdiri dari sekitar 17.508 buah pulau, sebagian besar diantaranya adalah pulau-pulau kecil dan sangat kecil. Pulau kecil didefinisikan sebagai pulau yang luasnya kurang dari atau sama dengan 10.000 km^2 dengan penduduk kurang dari atau sama dengan 500.000 orang, sedang pulau sangat kecil berukuran kurang dari 1000 km^2 dengan jumlah penduduk kurang dari 10.000 orang. Kawasan pulau-pulau kecil memiliki potensi pembangunan yang penting secara ekonomis, sosial, geopolitik dan ekologis. Seiring dengan program Pemerintah untuk mengejar target swasembada daging sapi, beberapa kegiatan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas sapi potong telah ditempuh, diantaranya melalui Inseminasi Buatan (IB), importasi, penjaringan betina produktif, dan pengembangan sentra-sentra bibbit di perdesaan (*Village Breeding Centre*). Dengan mempertimbangkan bahwa Indonesia terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, dan sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal, maka gagasan untuk memanfaatkan pulau-pulau kecil untuk menyukseskan agenda pemerintah "swasembada daging sapi" dapat dikemas dalam suatu format PKK-PSP (Pulau-pulau kecil sebagai Kawasan Pengembangan Sapi Potong). Pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagai kawasan pengembangan sapi potong akan memiliki keunggulan

komparatif dan keunggulan kompetitif yang sifatnya multifacet.

Dari aspek manajemen kesehatan sapi atau hewan lain, kegiatan *surveillance* merupakan salah satu pendukung dalam penanggulangan penyakit, baik berupa pencegahan, pengendalian dan pemberantasan. Kegiatan *surveillance* dan monitoring kesehatan sapi yang diterapkan pada pulau-pulau kecil akan memiliki manfaat komparatif spesifik yaitu status suatu pulau kecil sebagai perintang alami (*natural barrier*) terhadap peluang penyebaran penyakit. Hal ini sangat berbeda dengan pulau besar yang padat penduduk dan padat ternak. Namun demikian, agar tujuan produksi daging sapi dapat berjalan dengan efektif, beberapa permasalahan/ ancaman di pulau-pulau kecil seperti peluang transportasi agen infeksi maupun bahan-bahan yang mengandung agen infeksi atau vektor penyakit yang diselundupkan juga perlu diwaspadai.

Demikian pula ancaman status kesehatan ternak yang dikembangkan di pulau-pulau kecil dapat dipengaruhi oleh material yang terbawa oleh hewan atau peralatan peternakan. Oleh karena itu perlu ditegaskan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagai kawasan pengembangan sapi potong wajib menerapkan prinsip dasar dan aplikasi *Population Medicine*, hal ini semata-mata sebagai perwujudan tanggungjawab pengamanan penanaman modal (investasi) dan optimalisasi kemanfaatan.

PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN SAPI DI KABUPATEN BENGKALIS

Ahmad Ramli

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkalis

RINGKASAN

Kabupaten Bengkalis yang mempunyai visi "menjadi salah satu pusat perdagangan di Asia Tenggara dengan dukungan industri yang kuat dan sumberdaya manusia yang unggul, guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur pada tahun 2020" dan mengemban misi untuk mengembangkan daerah pantai, pesisir dan pulau-pulau secara terpadu untuk membuka isolasi daerah dan mengembangkan potensi sumberdaya alamnya melalui pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur yang memadai. Dalam hal ini terutama untuk pengembangan peternakan.

Untuk itu berdasarkan kebijakan tata ruang Kabupaten Bengkalis pada tahun 2005-2012, sekitar 75% kawasan pesisir pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Bengkalis telah dinyatakan cukup sesuai untuk kegiatan pengembangan ternak sapi maupun kambing.

Masih luasnya lahan tidur (54.784 Ha) di Kabupaten Bengkalis merupakan potensi yang mendukung pengembangan peternakan, disamping tersedianya limbah pertanian sebagai sumber pakan seperti: ampas sagu, jerami padi, daun kelapa sawit, bungkil kelapa, limbah pengolahan nenas, serta tersedianya rumput alam yang berlimpah.

Produksi daging sapi di Kabupaten Bengkalis masih sangat rendah baik untuk memenuhi kebutuhan lokal, regional maupun untuk suplai ke Negara tetangga. Dengan demikian prospek untuk pengembangan sapi di Kabupaten Bengkalis terbuka luas. Disamping itu letak wilayah Kabupaten Bengkalis yang berbatasan dengan Negara tetangga serta adanya pos perdagangan lintas batas merupakan faktor pendukung yang dapat menjamin kemudahan pemasaran hasil usaha peternakan.

POTENSI PULAU-PULAU TERLUAR DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU UNTUK PENGEMBANGAN PETERNAKAN SAPI POTONG

H. Said Jaafar

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan
Provinsi Kepulauan Riau

RINGKASAN

Salah satu misi Provinsi Kepulauan Riau adalah mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Kepulauan Riau yang akan menumbuhkembangkan kegiatan industri dan pariwisata yang berbasis kelautan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam rangka memanfaatkan pulau-pulau kecil dan terluar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Luas wilayah Kepulauan Riau sekitar 425 ribu km^2, dimana lebih dari 95 persen merupakan perairan/lautan dan jumlah penduduk 1.24 juta orang. Jumlah pulau sebanyak 1795 buah yang terdiri dari pulau besar dan kecil, serta 19 terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Pengembangan usaha sapi potong di Kepulauan Riau mempunyai sasaran untuk meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas sapi sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap terpenuhinya kebutuhan daging sapi di Kepulauan Riau dan nasional. Salah satu program yang dicanangkan adalah optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pulau terluar untuk pengembangan usaha sapi potong yang sekaligus dapat mengamankan wilayah NKRI. Strategi yang dilakukan adalah pengembangan sentra pembibitan dan penggemukan untuk sapi lokal dan sapi eks impor.

Kabupaten Natuna direkomendasikan sebagai prioritas lokasi pengembangan sapi potong dengan infrastruktur yang telah tersedia seperti pelabuhan laut dan udara, telekomunikasi, listrik, air bersih, perbankan, hotel dan wisma. Kecamatan Subi Besar dan Subi Kecil, berupa pulau dataran rendah, memiliki potensi lahan pertanian yang dapat mendukung pengembangan usaha sapi potong. Komoditas pertanian yang telah dikembangkan adalah jagung, padi, ketela rambat, sayuran, kacang tanah, kedelai dan jeruk.

ISBN : 978-979-8308-77-2

Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Jalan Raya Pajajaran Kav. E 59, Bogor 16151
Telp. (0251) 322185, 322138
Fax. (0251) 328382, 380588
E-mail: criansci@indo.net.id